

MANAJAMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMPN 1 MATARAM

Haikal Adinata Aswara¹ , Ismi Darmayani²

Program Studi PPKn, Fakultas FKIP, Universitas Mataram

Alamat: Jalan Majapahit No.62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

haikaladinata2648@gmail.com , ismidarmayani614@gmail.com

Corresponding Author : haikaladinata2648@gmail.com

ABSTRAK

School-Based Management (SBM) is an educational management approach that provides schools with greater autonomy in managing resources and making decisions to improve educational quality. This study aims to describe the implementation of SBM at SMP Negeri 1 Mataram based on interviews with school officials. The research method used was direct interviews with school informants and an analysis of ongoing management practices. The study results indicate that the implementation of SBM at SMP Negeri 1 Mataram focuses on three main principles: participation, transparency, and accountability. Participation is realized through the involvement of teachers, education staff, and students in various school meetings and programs. Transparency is reflected in the preparation and dissemination of the School Budget (RKAS) and the use of digital systems such as SIPLAH in financial transactions.

Keywords: School Based Management, participation, transparency, accountability, quality of education, SMP Negeri 1 Mataram.

ABSTRAK

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengatur sumber daya dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi MBS di SMP Negeri 1 Mataram berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber sekolah serta analisis terhadap praktik manajemen yang berlangsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Mataram berfokus pada tiga prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi diwujudkan melalui pelibatan guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam berbagai rapat dan program sekolah. Transparansi tercermin dari penyusunan dan sosialisasi RKAS serta penggunaan sistem digital seperti SIPLAH dalam transaksi keuangan.

Kata kunci: manajemen keuangan sekolah, wawancara, studi literatur, transparansi, akuntabilitas, pengawasan keuangan, dana pendidikan.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 702

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pergantian pandangan dalam pengelolaan pendidikan dari model yang terpusat ke yang terdesentralisasi telah menghasilkan sebuah metode baru bernama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan sistem manajemen yang memberikan lebih banyak kemandirian kepada sekolah, mendorong keterlibatan aktif anggota sekolah dan masyarakat, serta menekankan nilai keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan serta pengaturan sumber daya. Sasaran utama penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan, dan standar pendidikan secara menyeluruh dengan mendekatkan proses keputusan kepada pihak yang paling paham akan keperluan dan situasi di lapangan, yakni sekolah itu sendiri. Penerapan MBS menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan dan profesionalisme sebuah institusi pendidikan. Melalui metode ini, sekolah didorong untuk menjadi lebih independen, inovatif, dan tanggap terhadap hambatan serta kesempatan yang muncul. Kesuksesan MBS sangat tergantung pada kemampuan sekolah dalam membangun kerja sama yang harmonis antara kepala sekolah, tenaga pendidik, staf pendidikan, peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat.

SMP Negeri 1 Mataram, sebagai salah satu sekolah terkemuka di Kota Mataram, diduga telah menerapkan prinsip-prinsip MBS dalam kegiatan sehari-harinya. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, faktual, dan mendalam tentang praktik MBS di dunia nyata, maka dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola di SMP Negeri 1 Mataram, dengan maksud untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip MBS (partisipasi, transparansi, akuntabilitas), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan berharga dan contoh praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat manajemen sekolah secara lebih luas.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk partisipasi warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan sekolah?
3. Bagaimana mekanisme akuntabilitas yang diterapkan SMP Negeri 1 Mataram dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekolah?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan MBS, khususnya terkait perbedaan karakter dan tingkat partisipasi warga sekolah?
5. Bagaimana dampak penerapan MBS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Mataram?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan bentuk partisipasi warga sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram.
2. Menjelaskan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan sekolah.

3. Menguraikan mekanisme akuntabilitas yang diterapkan sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan MBS, terutama terkait perbedaan karakter dan tingkat partisipasi warga sekolah.
5. Menganalisis dampak penerapan MBS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan lebih banyak kemandirian kepada sekolah untuk membuat keputusan dan mengatur sumber daya. Berdasarkan Mulyasa (2020), MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekolah dengan memberdayakan semua elemen di dalamnya, seperti tenaga pendidik, staf pendidikan, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemandirian ini memungkinkan sekolah lebih adaptif dalam merancang, mengatur, dan menilai aktivitas pendidikan sesuai dengan kondisi setempat. Penerapan MBS juga menekankan nilai demokrasi dalam pendidikan, kerja sama, dan perbaikan kualitas secara terus-menerus.

2. Prinsip-prinsip MBS: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Sesuai dengan Depdiknas (2007), MBS menyoroti tiga prinsip dasar, yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

- Partisipasi melibatkan semua anggota sekolah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta eksekusi program sekolah. Keterlibatan ini mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
- Transparansi mewajibkan sekolah untuk membagikan informasi tentang perencanaan, keuangan, dan kegiatan secara terbuka. Transparansi dapat memperkuat kepercayaan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan sekolah (Nurhayati & Suryani, 2022).
- Akuntabilitas berarti sekolah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada pihak dalam maupun luar. Menurut Supriyadi (2021), akuntabilitas pendidikan adalah unsur penting untuk menjaga integritas dan kualitas tata kelola sekolah.

3. Pelaksanaan MBS dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Dalam MBS, sekolah mendapat wewenang untuk mengatur keuangan secara independen. Mulyasa (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Keuangan sekolah umumnya meliputi berbagai sumber dana seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kontribusi masyarakat, dan pendapatan dari unit usaha sekolah. Keterbukaan anggaran mendorong keterlibatan anggota sekolah dan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana pendidikan.

4. Partisipasi Warga Sekolah dalam MBS

Partisipasi adalah elemen utama dalam kesuksesan MBS. Menurut Levin (1987), keterlibatan tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta efektivitas program sekolah. Bentuk partisipasi bisa berupa pertemuan rutin, diskusi penyusunan program, dan keterlibatan komite sekolah.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar kemungkinan keberhasilan program pendidikan yang direncanakan.

5. Dampak MBS terhadap Mutu Pendidikan

Menurut Mulyasa (2020), MBS memberikan pengaruh besar pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya melalui penguatan manajemen sekolah, peningkatan motivasi tenaga pendidik, dan efektivitas proses belajar. Kepercayaan dan kerja sama antara pimpinan sekolah dan anggota sekolah mendorong pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliana & Hakim (2025) bahwa penerapan sistem manajemen yang transparan dan bertanggung jawab meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas layanan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara langsung dari narasumber melalui pengalaman, pendapat, dan praktik manajemen yang dilakukan di sekolah.

1. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan dengan salah satu pihak sekolah yang memiliki peran dalam pengelolaan manajemen sekolah. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-structured interview, sehingga memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan inti namun tetap fleksibel untuk menggali informasi tambahan sesuai respons narasumber. Wawancara ini berfokus pada implementasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tantangan MBS, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana praktik manajemen sekolah berlangsung. Peneliti memperhatikan suasana kerja, pola komunikasi antarwarga sekolah, mekanisme rapat, dan lingkungan administratif yang mendukung pelaksanaan MBS. Observasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti seperti struktur organisasi sekolah, jumlah warga sekolah, serta informasi kegiatan atau program yang relevan dengan implementasi MBS. Dokumentasi ini membantu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sekolah dan pelaksanaan manajemen.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

- Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dianalisis.
- Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama terkait implementasi MBS berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:



1. Penerapan Partisipasi Warga Sekolah dalam MBS

Partisipasi anggota komunitas sekolah di SMP Negeri 1 Mataram merupakan fondasi penting bagi keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sekolah secara aktif mendorong keterlibatan semua elemen, termasuk guru, staf pendidikan, dan siswa, dalam proses perencanaan dan eksekusi program. Hal ini tercermin dari gaya komunikasi kepemimpinan sekolah yang terbuka dan inklusif, yang membentuk budaya kerja yang melibatkan semua pihak. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin yang memberikan kesempatan bagi setiap anggota sekolah untuk mengemukakan pandangan, gagasan, dan kritik. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari budaya organisasi sekolah. Selain itu, partisipasi diwujudkan melalui pertemuan rutin. Rapat bulanan yang melibatkan semua guru tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah diskusi untuk menilai program, membahas keperluan, dan merancang solusi bersama. Rapat mingguan dengan wakil kepala sekolah memperkuat koordinasi antarunit, seperti kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan fasilitas. Jadwal rapat yang teratur dan melibatkan banyak pihak menandakan bahwa sekolah menerapkan prinsip pengambilan keputusan bersama sebagai inti MBS. Dari wawancara, terlihat bahwa guru merasa terlibat dan didengar, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap inisiatif sekolah.

Tidak hanya guru dan staf, siswa juga berkontribusi dalam mendukung MBS melalui partisipasi dalam organisasi, kegiatan ekstrakurikuler, serta program disiplin dan sosial. Keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas ini menunjukkan bahwa MBS di sekolah ini tidak hanya fokus pada manajemen internal, tetapi juga pada pemberdayaan peserta didik sebagai bagian dari komunitas sekolah. Dengan demikian, partisipasi dalam MBS di SMP Negeri 1 Mataram terjadi secara komprehensif, dari tingkat kepemimpinan hingga siswa. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif dan dialogis dapat meningkatkan efektivitas MBS serta mendorong pencapaian tujuan pendidikan secara bersama.

2. Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Sekolah

Transparansi merupakan elemen krusial dalam manajemen sekolah di SMP Negeri 1 Mataram, dan penelitian menunjukkan komitmen kuat sekolah dalam menerapkannya. Transparansi terutama terlihat dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS disiapkan melalui diskusi bersama yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan beberapa staf pendidikan. Dalam proses ini, kebutuhan sekolah dari berbagai aspek dibahas secara terbuka, mulai dari rencana pembelajaran, pengadaan fasilitas, hingga penggunaan dana operasional lainnya. Dengan keterlibatan banyak pihak, penyusunan RKAS bukan hanya administratif, tetapi juga kolaboratif, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aktual sekolah. Selain dalam penyusunan anggaran, transparansi diterapkan melalui

sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan tercatat dengan baik. Setiap transaksi dilakukan secara non-tunai melalui bank dan didukung oleh aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). SIPLAH memungkinkan semua proses pembelian barang dan jasa tercatat otomatis, sehingga mengurangi risiko manipulasi atau penyalahgunaan dana. Ini selaras dengan prinsip tata kelola yang baik di lembaga pendidikan, di mana digitalisasi administrasi menjadi alat penting untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sekolah. Proses digital ini juga memfasilitasi pengawasan, baik oleh internal sekolah maupun pihak eksternal seperti komite sekolah dan dinas pendidikan.

Transparansi tidak terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup informasi program dan kegiatan sekolah. Melalui pertemuan internal, papan pengumuman, dan komunikasi langsung antara pimpinan dan anggota sekolah, semua proses pelaksanaan program dapat diakses secara terbuka. Guru dan staf mendapat akses untuk mengetahui anggaran yang digunakan dalam kegiatan mereka, sementara siswa dan orang tua mendapat informasi relevan melalui sosialisasi atau pertemuan komite. Ini menciptakan hubungan harmonis dan saling percaya antara sekolah dan komunitas pendidikan. Dengan demikian, transparansi di SMP Negeri 1 Mataram tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota sekolah terhadap kebijakan dan keputusan manajemen.

3. Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Anggaran

Akuntabilitas di SMP Negeri 1 Mataram tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang terstruktur dan konsisten. Berdasarkan wawancara, sekolah menerapkan sistem pelaporan anggaran yang jelas dan dapat dilacak oleh semua pihak terkait. Kepala sekolah, sebagai pemegang tanggung jawab utama, memastikan bahwa setiap program dalam RKAS dilaksanakan sesuai aturan. Sementara itu, bendahara sekolah mencatat semua transaksi secara rinci dan memverifikasi bukti pengeluaran agar sah. Kombinasi peran ini menunjukkan pembagian tanggung jawab yang seimbang untuk memastikan akuntabilitas berjalan efektif. Selain pencatatan keuangan, sekolah menyampaikan laporan secara berkala dalam pertemuan resmi dengan guru dan wakil kepala sekolah. Dalam pertemuan tersebut, bendahara menyajikan realisasi anggaran, kegiatan yang telah dilakukan, serta dana yang digunakan di setiap pos. Penyampaian laporan terbuka ini memungkinkan anggota sekolah mengetahui perkembangan keuangan secara real-time, sekaligus memberikan kesempatan untuk evaluasi bersama tentang efektivitas penggunaan dana. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat budaya akuntabilitas internal melalui komunikasi yang transparan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa setiap pengeluaran dana didukung oleh bukti fisik seperti kwitansi, nota, atau dokumen transaksi lainnya yang valid. Semua bukti disimpan secara sistematis oleh kepala tata usaha (KTU) sebagai arsip yang dapat diperiksa kapan saja oleh pihak internal atau eksternal. Prosedur dokumentasi ini penting untuk akuntabilitas karena memastikan setiap dana yang digunakan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Dalam konteks MBS, pengelolaan dokumen fisik yang baik memperkuat integritas manajemen sekolah dan menjadi bukti nyata bahwa sekolah menerapkan akuntabilitas secara praktis, bukan hanya dalam kebijakan.

4. Tantangan dalam Implementasi MBS

Meskipun implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram berjalan baik, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan yang masih dihadapi sekolah dalam mengoptimalkannya. Tantangan utama berasal dari perbedaan karakter, latar belakang, dan tingkat partisipasi anggota sekolah. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.383 orang, 67 guru, dan sekitar 20 staf administrasi, keragaman ini menciptakan dinamika unik dalam pelaksanaan

program. Tidak semua guru atau siswa memiliki tingkat kepedulian, motivasi, dan semangat kolaborasi yang sama, sehingga partisipasi dalam kegiatan sekolah tidak merata. Beberapa anggota sekolah cenderung pasif dalam memberikan input atau mengikuti perencanaan dan evaluasi, sehingga diskusi tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang benar-benar mewakili aspirasi semua pihak. Selain faktor karakter, tantangan lain muncul dari aspek teknis dan administratif, khususnya dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas di MBS. Meskipun sekolah menggunakan aplikasi digital seperti SIPLAH dan sistem non-tunai, tidak semua anggota sekolah memahami cara kerjanya secara mendalam. Ini kadang menyebabkan kesalahpahaman atau keterlambatan dalam pengajuan kebutuhan karena masih ada yang terbiasa dengan metode manual. Di sisi lain, beban administratif yang tinggi, terutama dalam penyusunan RKAS dan pertanggungjawaban anggaran, menambah tekanan bagi bendahara dan staf administrasi. Mereka harus memastikan semua dokumen sesuai aturan dan siap diperiksa kapan saja, sehingga kesalahan kecil dapat memengaruhi pelaporan keseluruhan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah anggota sekolah yang besar membuat koordinasi antarunit memerlukan upaya lebih besar dan waktu lebih lama. Misalnya, saat ada kegiatan mendadak atau perubahan program, komunikasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf tidak selalu lancar karena kesibukan masing-masing. Tantangan koordinasi ini lebih terasa ketika sekolah harus melibatkan komite atau pihak luar dalam pengambilan keputusan. Meskipun MBS menuntut kolaborasi, kenyataannya kolaborasi tidak selalu instan karena keterbatasan waktu, kapasitas sumber daya manusia, dan perbedaan prioritas antarpejabat sekolah. Namun, sekolah tetap mengatasi tantangan ini melalui komunikasi intensif, diskusi rutin, dan kepemimpinan kepala sekolah yang inklusif. Dukungan masyarakat, kepercayaan anggota sekolah, dan budaya kerja positif menjadi modal utama untuk mengurangi dampak hambatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam implementasi MBS memang nyata dan kompleks, tetapi dapat diatasi melalui kolaborasi, penyesuaian, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara terus-menerus.

5. Dampak Penerapan MBS terhadap Mutu Pendidikan

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram memberikan pengaruh positif yang signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa tiga prinsip utama MBS—partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas—mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan guru dan staf dalam perencanaan program sekolah mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Partisipasi berbagai pihak dalam perencanaan juga membuat program yang dirancang lebih mudah diterima dan dilaksanakan, sehingga langsung memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan sekolah meningkatkan kepercayaan antara pimpinan sekolah dan anggota sekolah. Kepercayaan ini menjadi aset sosial penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika guru dan staf merasa bahwa manajemen sekolah dilakukan dengan jujur dan terbuka, motivasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas meningkat. Motivasi ini memengaruhi kualitas pengajaran, disiplin, serta interaksi antara guru dan siswa. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga budaya kerja sekolah secara menyeluruh.

Akuntabilitas juga berkontribusi besar pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan evaluasi berkala, setiap program sekolah dapat dipantau efektivitasnya. Jika suatu kegiatan tidak sesuai rencana, sekolah dapat segera melakukan perbaikan atau penyesuaian. Evaluasi yang konsisten ini membuat sekolah lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan perubahan situasi, baik akademik maupun non-akademik. Ini memperkuat temuan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi

mekanisme kunci yang membantu sekolah tetap adaptif dan terarah. Secara keseluruhan, dampak implementasi MBS di SMP Negeri 1 Mataram terlihat dari peningkatan efektivitas pelaksanaan program sekolah dan kualitas hasil belajar siswa. Hampir semua program yang direncanakan berjalan sesuai jadwal dan tujuan. Lingkungan sekolah yang lebih mendukung, komunikasi harmonis antaranggota sekolah, serta pengelolaan dana yang lebih tertib menciptakan kondisi belajar yang lebih baik bagi siswa. Dengan demikian, penerapan MBS terbukti mendorong manajemen sekolah yang profesional dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

ISI DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip-prinsip utama MBS dengan cara yang terorganisir dan konsisten, sehingga menghasilkan model manajemen yang lebih otonom, demokratis, dan melibatkan partisipasi aktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sekolah telah memanfaatkan wewenang yang diberikan untuk mengelola sumber daya internal guna meningkatkan kualitas pendidikan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin menjadi elemen kunci dalam membentuk budaya kerja sama antara guru, staf pendidikan, dan siswa. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pendukung yang mendorong anggota sekolah untuk berani mengutarakan pendapat, ikut serta dalam perencanaan, dan aktif dalam menjalankan program sekolah. Model manajemen ini sesuai dengan prinsip dasar MBS yang menekankan desentralisasi keputusan agar sekolah dapat lebih tanggap terhadap berbagai kebutuhan lokal. Keterlibatan berbagai elemen sekolah dalam perencanaan dan evaluasi memberikan dampak positif pada keefektifan program, karena keputusan didasarkan pada pemahaman langsung kondisi di lapangan. Dengan demikian, prinsip otonomi dan partisipasi sebagai fondasi MBS telah memperkuat kemampuan sekolah untuk merumuskan kebijakan yang realistis, berfokus pada kebutuhan, dan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh komunitas sekolah.



Salah satu aspek krusial yang mendukung penerapan MBS di SMP Negeri 1 Mataram adalah tingginya tingkat partisipasi warga sekolah, yang terlihat dalam mekanisme diskusi dan koordinasi rutin. Penglibatan guru dalam rapat bulanan dan koordinasi mingguan dengan wakil kepala sekolah menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dan bukan top-down. Setiap guru mendapat kesempatan untuk menyampaikan hambatan pembelajaran, mengajukan program, serta memberikan penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini membangun rasa kepemilikan yang kuat terhadap program sekolah, sehingga kebijakan lebih mudah diterima dan diimplementasikan di tingkat kelas maupun organisasi.

Partisipasi aktif ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, karena setiap anggota memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Dengan demikian, pelaksanaan MBS tidak hanya memberikan otonomi struktural kepada sekolah, tetapi juga menumbuhkan budaya kolaborasi yang menjadi dasar untuk inovasi, peningkatan kualitas, dan kelangsungan program pendidikan.

Transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan merupakan salah satu elemen penting yang meningkatkan efektivitas MBS di SMP Negeri 1 Mataram. Berdasarkan temuan penelitian, sekolah tidak hanya menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) melalui diskusi bersama, tetapi juga menyebarkannya kepada warga sekolah agar semua pihak memahami arah kebijakan dan prioritas penganggaran. Penyampaian informasi anggaran memungkinkan guru dan staf pendidikan mengetahui sumber dana, alokasi pembiayaan, serta batasan penggunaan sesuai aturan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital seperti SIPLAH dan transaksi non tunai mempercepat proses pencatatan dan mengurangi risiko manipulasi keuangan. Digitalisasi ini mencerminkan upaya sekolah untuk menyesuaikan dengan tuntutan manajemen modern yang menekankan akuntabilitas publik.

Transparansi seperti ini tidak hanya membangun kepercayaan guru dan staf terhadap kepemimpinan sekolah, tetapi juga memudahkan pengawasan internal serta meminimalkan potensi konflik terkait pengelolaan dana. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang diterapkan menjadi fondasi penting untuk membangun manajemen yang bersih, efisien, dan dipercaya oleh seluruh warga sekolah. Akuntabilitas sebagai pilar utama MBS juga memberikan dampak signifikan terhadap pola kerja dan kualitas pengelolaan di SMP Negeri 1 Mataram. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah membentuk sistem pelaporan yang bertingkat dan terstruktur, mulai dari pencatatan transaksi oleh bendahara, verifikasi dokumen oleh kepala tata usaha (KTU), hingga penyampaian laporan secara terbuka dalam rapat guru atau rapat pimpinan. Mekanisme ini memastikan setiap kegiatan dan pengeluaran diawasi langsung oleh pihak internal sekolah. Selain itu, komitmen sekolah untuk mengembalikan sisa anggaran ke kas negara menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai nilai moral yang dijunjung tinggi. Penerapan akuntabilitas yang konsisten tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga membuat sekolah lebih disiplin dalam merencanakan dan memprioritaskan kebutuhan. Hal ini berdampak pada efisiensi penggunaan dana dan pembentukan budaya kerja yang bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntabilitas di SMP Negeri 1 Mataram berfungsi sebagai alat kontrol yang membantu sekolah beroperasi lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi pendidikan.

Selain memperkuat tata kelola internal, penerapan MBS di SMP Negeri 1 Mataram juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekolah, baik akademik maupun non akademik. Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua program yang direncanakan dalam RKAS dapat dilaksanakan sesuai jadwal berkat koordinasi yang matang dan komunikasi yang terstruktur. Keterlibatan aktif guru dalam merancang dan mengevaluasi program membuat pelaksanaan kegiatan lebih realistis dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Di sisi lain, siswa juga mendapat manfaat dari fasilitas pembelajaran yang lebih memadai dan kegiatan sekolah yang dikelola dengan baik. Contohnya, penyediaan sarana kelas yang diperbaiki secara rutin, kegiatan ekstrakurikuler yang lebih terorganisir, dan program pembinaan karakter yang ditangani secara sistematis. Situasi ini menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, di mana guru lebih mudah menjalankan tugas dan siswa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, implementasi MBS tidak hanya memperkuat manajemen, tetapi juga langsung meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Namun, efektivitas pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Mataram tidak lepas dari berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakter,

kebutuhan, dan tingkat partisipasi di antara warga sekolah. Dengan jumlah warga sekolah yang besar lebih dari seribu siswa dan puluhan guru serta staf pendidikan koordinasi memerlukan upaya ekstra. Tidak semua guru terlibat sama aktif dalam diskusi atau perencanaan program, sehingga kepala sekolah dan pimpinan lain harus terus melakukan pendekatan dan membangun komunikasi intensif agar semua pihak merasa terlibat. Selain itu, keragaman latar belakang siswa memerlukan guru untuk membuat strategi pembelajaran yang adaptif, sementara manajemen harus menyesuaikan kebijakan untuk menjangkau semua kelompok. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun MBS memberikan otonomi luas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas interaksi antarpersonel dan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola dinamika manusia di sekolah.

Selain tantangan internal terkait karakter dan partisipasi warga sekolah, aspek teknis dan administratif juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan MBS di SMP Negeri 1 Mataram. Penggunaan sistem digital seperti SIPLAH dan transaksi non tunai memang meningkatkan transparansi, tetapi tidak semua guru atau staf pendidikan memiliki pemahaman sama tentang prosedur dan cara kerjanya. Hal ini kadang menyebabkan keterlambatan pengajuan kebutuhan, kesalahan input data, atau miskomunikasi antara pengusul dan pengelola anggaran. Selain itu, regulasi keuangan yang ketat terutama penggunaan dana BOS yang tidak boleh untuk kegiatan konsumtif atau di luar pendidikan membatasi fleksibilitas sekolah dalam menanggapi kebutuhan mendadak. Untuk kebutuhan kecil seperti konsumsi tamu, perbaikan darurat, atau pengadaan barang kecil di luar RKAS, sekolah sering bergantung pada dana koperasi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi dalam MBS tetap dibatasi oleh regulasi, sehingga sekolah harus menyeimbangkan kepatuhan aturan dengan kebutuhan operasional harian yang lebih dinamis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, SMP Negeri 1 Mataram berhasil mempertahankan keberhasilan implementasi MBS melalui penguatan koordinasi dan kepemimpinan yang adaptif. Kepala sekolah memainkan peran penting dalam memastikan semua warga sekolah tetap terlibat dan memahami arah kebijakan. Kepemimpinan yang komunikatif, terbuka, dan mampu merangkul guru serta staf pendidikan terbukti menciptakan suasana kerja yang kondusif dan penuh kepercayaan. Selain itu, rapat rutin seperti rapat bulanan untuk semua guru dan rapat mingguan antar wakil kepala sekolah menjadi forum penting untuk menjaga kelangsungan komunikasi dan efektivitas koordinasi. Melalui forum tersebut, sekolah dapat melakukan evaluasi rutin, memantau perkembangan program, serta menyelesaikan hambatan secara cepat dan bersama. Dengan demikian, strategi koordinatif dan gaya kepemimpinan demokratis menjadi faktor kunci yang membantu sekolah menjaga stabilitas manajemen dan memastikan implementasi MBS berjalan sesuai tujuan meskipun dalam lingkungan yang kompleks dan berubah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Mataram telah berjalan dengan baik dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama MBS, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi warga sekolah tercermin dari keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sekolah melalui rapat rutin dan koordinasi terstruktur. Transparansi terlihat dari proses penyusunan dan sosialisasi RKAS, penggunaan sistem digital seperti SIPLAH, serta pelaporan keuangan yang terbuka kepada warga sekolah. Sementara itu, akuntabilitas

diwujudkan melalui dokumentasi yang lengkap, pelaporan anggaran berkala, serta pengembalian sisa dana ke kas negara sesuai regulasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan MBS masih menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan karakter dan tingkat partisipasi warga sekolah, keterbatasan pemahaman terhadap sistem administrasi digital, serta aturan keuangan yang ketat sehingga mengurangi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan mendadak. Namun, kepemimpinan yang inklusif, komunikasi yang efektif, serta budaya kerja kolaboratif membantu sekolah mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, penerapan MBS terbukti memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Mataram, baik dari segi efektivitas pelaksanaan program maupun kualitas lingkungan belajar yang lebih kondusif, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa, E. (2020). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhayati, L., & Suryani, D. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah menengah. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 6(2), 112-124.

Taufik, M., & Rahmadani, N. (2024). Tantangan pengelolaan dana pendidikan di era digitalisasi sekolah. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Pendidikan, 8(1), 66-78.

Yuliana, R., & Hakim, F. (2025). Efektivitas sistem digital dalam meningkatkan transparansi keuangan sekolah. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Administrasi, 5(1), 1-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). (Pemutakhiran 2022). Jakarta: Sekretariat Negara.

Depdiknas. (2007). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Supriyadi. (2021). Pengawasan Pendidikan dan Akuntabilitas Publik. Jakarta: Bumi Aksara.